



KPU KULONPROGO
Pemangkasan Anggaran, Hentikan Sewa Kendaraan Dinas

WATES (KR)-Dampak pemangkasan anggaran dari pemerintah pusat, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kulonprogo ikut merasakan. Selama ini, anggaran operasional bergantung pada alokasi dari KPU RI. Secara nasional, anggaran untuk KPU seluruh Indonesia pada 2025 ini terpangkas sekitar Rp 900 miliar. Anggaran secara nasional yang awalnya Rp 3 triliun kini tinggal Rp 2,1 triliun.

Dampak yang paling terlihat adalah biaya sewa kendaraan dinas untuk komisioner di tingkat kabupaten/kota. Anggaran itu berasal dari provinsi, yakni KPU DIY. Sewa kendaraan berupa mobil untuk para komisioner di tingkat kabupaten/kota sudah ditarik sejak 17 Februari 2025. Kami



Budi Priyana
KR-Widiastuti

saat ini hanya menggunakan kendaraan pribadi," ujar Ketua KPU Kulonprogo Budi Priyana, Senin (3/3).

Budi menjelaskan, anggaran untuk KPU di daerah tinggal yang bersifat rutin saja, terutama belanja pegawai dan pemeliharaan kantor. "Meski begitu, kami tetap berupaya agar seluruh kegiatan tidak terganggu

dengan adanya kebijakan itu. Seperti untuk pertemuan dan rapat yang sifatnya penting dilakukan secara virtual, menyesuaikan kemampuan anggaran yang ada," ucapnya.

Beruntung, kata Budi, seluruh tahapan Pilkada 2024 sudah selesai sehingga tidak terdampak kebijakan pemangkasan anggaran. Salah satu tahap akhir yang dilakukan adalah evaluasi pelaksanaan Pilkada pada 26 Februari 2025 lalu. "Masih ada dana hibah dari Pemkab Kulonprogo untuk kegiatan itu, yang bisa digunakan sampai 10 April 2025. Nanti KPU Kulonprogo akan melaporkan hasil penggunaan dana hibah tersebut ke Pemkab, termasuk mengembalikan dana hibah yang masih tersisa" tuturnya. **(Wid)-d**